

## **INTISARI**

# **KAJIAN TERHADAP KESESUAIAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN LOGIKA MATEMATIKA**

Oleh

HANA SAFITRI

15/378126/PA/16601

Pada skripsi ini dibahas mengenai kajian terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) berdasarkan logika matematika. Dalam hal ini, bagian undang-undang yang akan dikaji terfokus pada Bab V terkait pasal tindak pidana yang berisikan hukuman apa yang akan diberikan apabila seseorang melakukan suatu tindak kekerasan seksual.

Definisi mengenai kekerasan seksual menjadi hal yang sangat penting dikarenakan dapat mempengaruhi apakah tindakan yang dilakukan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan seksual atau tidak. Hal tersebut erat kaitannya dengan ancaman pidana yang diberikan sesuai yang ditulis pada BAB V Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam hal ini selanjutnya akan dianalisis terkait pasal-pasal tindak pidana dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan modus ponens, identifikasi menggunakan ekuivalensi logika implikasi dan ingkaran dari logika implikasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap kebenaran pasal-pasal tindak pidana tersebut berdasarkan logika matematika.

## **ABSTRACT**

### **THE STUDY OF "RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL" CONFORMITY BASED ON MATHEMATICAL LOGIC**

By

HANA SAFITRI

15/378126/PA/16601

This thesis discussed the study of "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" based on mathematical logic. In this case, the part of the law studied focused on Chapter V relating to Criminal Act which contains what punishment will be given in a certain case.

The definition of sexual harassment becomes a very significant issue because it is able to affect ones position whether a suspect considered as a sexual harassment perpetrator or not. It relates to criminal threats that be given according to Chapter V of "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual". This research analyzed the articles of criminal act by using modus ponens rule. So, it revealed a conclusion against the truth of the criminal act articles based on mathematic logic. By doing the articles in Chapter V of "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" analysis, it could be concluded that value of law speech was valid according to modus ponens rule, the identification of logic equivalence implication, and negation from implication logic which did not change the meaning of speech law itself.